



Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Timbul Dompok¹, Lubna Salsabila², Remember To Harefa³, Yubelium Halawa⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

¹timbul.dompok@puterabatam.ac.id

²lubna.salsa68@gmail.com

³pb231010019@upbatam.ac.id

⁴pb231010021@upbatam.ac.id

Abstract

This study analyzes the efforts and optimization of the role of the General Election Commission (KPU) of Batam City in increasing the participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections. The focus includes socialization strategies, the effectiveness of information media, and factors influencing the political awareness of the younger generation. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with KPU commissioners and five first-time voter respondents. Of the total 899,666 voters registered in the Permanent Voter List (DPT) for the Regional Head Elections, 227,324 were first-time voters. The results show that the Batam KPU employed various strategies, such as Goes to School, Goes to Campus, social media platforms (Instagram and YouTube), creative competitions, and watch parties. Social media proved effective in reaching young voters, although face-to-face methods remain necessary. The challenges faced included voter fatigue due to the close scheduling of elections and limited campaign periods. First-time voter participation was influenced by socioeconomic factors, media opinions, community leaders, and perceptions of government programs. The study concludes that interactive socialization innovations and cross-sectoral support are necessary to increase the political participation of the younger generation.

Keywords: General Election Commission (KPU), first-time voters, political participation, election socialization, Batam City.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis upaya dan optimalisasi peran KPU Kota Batam dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Serentak 2024. Fokusnya meliputi strategi sosialisasi, efektivitas media informasi, serta faktor yang memengaruhi kesadaran politik generasi muda. Dengan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan komisioner KPU dan lima responden pemilih pemula. Dari total 899.666 pemilih pada DPT Pilkada, 227.324 merupakan pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan KPU Batam menggunakan strategi beragam seperti *Goes to School*, *Goes to Campus*, media sosial (Instagram,

YouTube), serta lomba kreatif dan nonton bareng. Media sosial terbukti efektif menjangkau pemilih muda, namun metode tatap muka tetap dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi meliputi kejenuhan akibat jadwal pemilu berdekatan dan keterbatasan waktu kampanye. Partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, opini media, tokoh masyarakat, dan persepsi program pemerintah. Penelitian menyimpulkan perlunya inovasi sosialisasi interaktif dan dukungan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

Kata Kunci: KPU, pemilih pemula, partisipasi politik, sosialisasi pemilu, Kota Batam

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi sarana penting bagi rakyat untuk menentukan wakilnya dan membentuk pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi. UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Halilah, 2022).

KPU memiliki tanggung jawab tidak hanya secara yuridis formal sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjadikan pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Pemilu bukan hanya proses memilih wakil rakyat atau presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan mendidik masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan partisipatif (Biroroh & Muwahid, 2021). Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi; semakin tinggi partisipasi menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan dan kepedulian rakyat terhadap sistem politik (Megawati & Padang, 2020). Dalam konteks lokal, tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Batam menunjukkan tren positif. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi mencapai 72,24% atau 470.180 dari 650.876 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meski meningkat dibandingkan periode sebelumnya, partisipasi politik masih perlu dioptimalkan, terutama menjelang Pemilu Serentak 2024. Salah satu segmen yang menjadi perhatian khusus KPU adalah pemilih pemula, yaitu warga negara berusia 17–21 tahun yang baru pertama kali memiliki hak pilih (UU Pemilu Pasal 198).

Pemilih pemula memiliki jumlah yang signifikan, namun kesadaran politik mereka cenderung rendah. Mereka sering bersikap apatis, kurang memahami arti penting pemilu, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kesadaran politik generasi muda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, peran keluarga, opini media, tokoh masyarakat, serta persepsi terhadap program dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini membentuk cara pandang generasi muda terhadap politik dan memengaruhi sejauh mana mereka bersedia berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di daerah, KPU Kota Batam memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Berbagai upaya dilakukan melalui strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti program *Goes to School*, *Goes to Campus*, lomba kreatif, kegiatan nonton bareng, serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan YouTube. Media digital terbukti efektif dalam menjangkau pemilih muda karena selaras dengan

karakteristik generasi yang dekat dengan teknologi. Namun demikian, metode tatap muka tetap diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan membangun kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dan pemilih pemula. Kendala yang dihadapi KPU Batam antara lain kejenuhan akibat jadwal pemilu yang berdekatan, keterbatasan waktu kampanye, dan beragam tingkat pemahaman politik di kalangan pemilih muda. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran dan strategi KPU Kota Batam melalui inovasi sosialisasi interaktif serta kolaborasi lintas sektor agar kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Optimalisasi Peran KPU Kota Batam dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak 2024”, yang bertujuan untuk menganalisis strategi sosialisasi, efektivitas media informasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik generasi muda di Kota Batam.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Serentak 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perilaku, persepsi, pengalaman, dan motivasi para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses sosialisasi dan peningkatan partisipasi politik generasi muda. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Kota Batam yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Sekupang, Batam. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat kegiatan penyelenggaraan pemilu, sekaligus tempat dilaksanakannya berbagai program sosialisasi bagi pemilih pemula. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari tiga orang komisioner dan dua staf KPU Kota Batam yang berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, serta lima orang pemilih pemula yang berasal dari kalangan pelajar SMA dan mahasiswa di Kota Batam. Pemilih pemula dipilih dengan mempertimbangkan variasi latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan tingkat keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, agar diperoleh pandangan yang beragam dan representatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada komisioner, staf KPU, dan pemilih pemula untuk menggali informasi terkait strategi sosialisasi yang digunakan, efektivitas media informasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik generasi muda. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi seperti *Goes to School*, *Goes to Campus*, lomba kreatif, dan nonton bareng. Observasi ini difokuskan untuk melihat secara langsung bentuk pelaksanaan kegiatan, interaksi antara petugas KPU dengan peserta, serta respon dan antusiasme pemilih muda terhadap metode sosialisasi yang dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, berupa laporan kegiatan, arsip resmi KPU, data pemilih tetap, publikasi media sosial KPU, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi politik.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, serta mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi terhadap pola, strategi, dan faktor yang ditemukan di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara

berulang untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan dengan hasil observasi lapangan dan dokumen resmi KPU. Melalui kombinasi ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid, komprehensif, dan mendalam mengenai strategi serta optimalisasi peran KPU Kota Batam dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Pemilu di Kota Batam merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan untuk memilih pemimpin secara demokratis, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sebagai kota metropolitan di Provinsi Kepulauan Riau, Batam memiliki jumlah pemilih yang cukup besar dan heterogen (Halilah, 2022). Hal ini sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pemilih Kota Batam

No	Data	Jumlah
1	DPT Pemilu	851.614
2	Pemilih saat Pemilu	651.399
3	DPT Pilkada	899.666
4	Pemilih saat Pilkada	436.678
5	Pemilih Gen-Z (17-27 tahun)	227.324

Sumber: KPU Kota Batam (2024)

3.2 Pembahasan

KPU Kota Batam menjalankan strategi sosialisasi dengan menysasar 11 segmen pemilih, mencakup pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat *hinterland*, komunitas adat, organisasi pemuda, serta kelompok keagamaan. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan sosial-politik di Batam yang sangat beragam, baik dari segi usia, gender, latar belakang budaya, maupun kondisi geografis (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Dengan pendekatan segmentatif ini, KPU dapat menyesuaikan metode dan konten sosialisasi agar lebih tepat sasaran. Misalnya, pendekatan untuk pemilih pemula tentu berbeda dengan metode sosialisasi kepada masyarakat *hinterland* atau kelompok keagamaan.

Bagi pemilih pemula, KPU mengimplementasikan program unggulan *Goes to School* dan *Goes to Campus*. Strategi ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke sekolah menengah atas (SMA/SMK) dan perguruan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, KPU tidak hanya menyampaikan materi teoretis, tetapi juga simulasi pemungutan suara, workshop literasi politik, serta ruang diskusi interaktif. Pendekatan partisipatif ini dianggap lebih efektif dibanding sekadar memberikan informasi sepihak (Putri, 2019).

Selain itu, KPU Kota Batam memanfaatkan momentum Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah sebagai sarana integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum formal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan politik harus menyentuh aspek teknis sekaligus substantif, yaitu menumbuhkan kesadaran kritis generasi muda terhadap pentingnya demokrasi (Fitriani, 2021). Dengan demikian, literasi politik yang dibangun tidak hanya bersifat teknis (cara

mencoblos atau memahami surat suara), tetapi juga substantif, yakni membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Di samping pendekatan tatap muka, KPU juga mengembangkan kegiatan kreatif yang dekat dengan dunia anak muda, seperti lomba *selfie* di TPS, lomba pantun kepemiluan, lomba video pendek, dan nonton bareng (nobar) dengan diskusi kepemiluan. Inovasi ini memiliki dua tujuan utama: membuat pesan politik terasa ringan dan relevan dengan gaya komunikasi generasi muda, serta mendorong partisipasi aktif (Rahayu, 2021).

Dalam konteks era digital, KPU Kota Batam juga memanfaatkan media sosial secara intensif. Platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan informasi kepemiluan, mulai dari tahapan pemilu, tata cara pencoblosan, hingga informasi mengenai daftar pemilih tetap (DPT). Media sosial dipandang sebagai kanal strategis karena hampir seluruh pemilih pemula aktif dalam ruang digital. Melalui konten visual yang menarik seperti infografis, video pendek, *reels*, hingga *live streaming* agar KPU dapat menjangkau audiens muda dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Hal ini penting karena hampir seluruh pemilih pemula aktif di ruang digital (Hidayat, 2020).

Namun demikian, KPU menilai bahwa meskipun media sosial sangat penting, metode tatap muka tetap lebih komprehensif. Alasannya, tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, sehingga peserta sosialisasi dapat langsung menyampaikan pertanyaan, keraguan, maupun kritik yang kemudian bisa segera dijawab oleh pihak KPU. Selain itu, tatap muka juga menciptakan kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dan pemilih. Hubungan yang hangat ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya serta menekan potensi apatisisme politik. Dengan kombinasi antara strategi digital dan interaksi langsung, KPU Kota Batam berupaya menghadirkan pendekatan yang adaptif, menyenangkan, sekaligus substansial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Kendala utama sosialisasi bukan pada faktor internal, melainkan eksternal. Pertama, waktu antara Pemilu dan Pilkada yang berdekatan menimbulkan kejenuhan. Kedua, periode kampanye yang singkat membatasi ruang komunikasi politik. Untuk mengatasi hal ini, KPU memaksimalkan waktu dengan strategi komunikasi sederhana dan menekankan pentingnya suara pemilih muda yang jumlahnya mencapai hampir 60% dari total DPT (Megawati & Padang, 2020). Hasil wawancara dengan lima pemilih pemula menunjukkan bahwa secara umum mereka menilai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batam sudah cukup baik dan bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai proses kepemiluan. Para pemilih muda ini mengakui bahwa KPU memanfaatkan beragam saluran komunikasi, baik yang bersifat konvensional maupun digital. Media konvensional seperti tatap muka, spanduk, brosur, baliho, dan pamflet masih dianggap penting karena mampu memberikan kehadiran nyata KPU di tengah masyarakat. Sementara itu, media digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dinilai lebih efektif untuk menarik perhatian generasi muda yang mayoritas aktif di ruang digital.

Meskipun demikian, ada catatan kritis dari responden terkait penggunaan bahasa komunikasi. Informasi yang disampaikan KPU dianggap cukup jelas secara substansi, namun gaya bahasa yang digunakan kerap terlalu formal dan kaku. Hal ini membuat pesan politik kurang terasa dekat dengan gaya komunikasi anak muda yang cenderung sederhana, ringkas, dan menggunakan ekspresi yang lebih santai. Kritik ini menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada media yang digunakan, tetapi juga pada gaya penyampaian pesan yang sesuai dengan karakter audiens. Mayoritas responden sepakat bahwa media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, merupakan sarana paling efektif untuk menjangkau pemilih pemula. Alasannya, media tersebut menyajikan konten yang bersifat visual, cepat, dan interaktif, sehingga lebih

mudah dipahami sekaligus menghibur. Fitur-fitur seperti *reels*, story, dan video pendek dianggap sangat relevan untuk mengedukasi generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada informasi berbasis gambar dan video ketimbang teks panjang.

Namun, wawancara juga mengungkapkan pentingnya sosialisasi tatap muka sebagai bentuk pendekatan yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi digital. Interaksi langsung memungkinkan terjadinya dialog dua arah, memberikan kesempatan untuk bertanya, serta membantu menjawab keraguan pemilih secara lebih personal. Selain itu, tatap muka dipandang sangat penting untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia atau individu yang belum terbiasa menggunakan media digital.

Temuan ini menegaskan perlunya kombinasi strategi digital dan konvensional dalam sosialisasi kepemiluan. Sosialisasi berbasis media sosial memang efektif menjangkau generasi muda, tetapi pendekatan tatap muka tetap dibutuhkan untuk menjamin inklusivitas dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memahami informasi kepemiluan secara menyeluruh. Dengan demikian, KPU perlu terus mengoptimalkan kedua strategi tersebut secara seimbang agar pesan demokrasi tersampaikan dengan baik sekaligus membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Informan juga menyebut beberapa kendala. Pertama, informasi kadang datang terlalu dekat dengan hari pemungutan suara sehingga pemahaman masyarakat tidak maksimal. Kedua, bahasa komunikasi yang digunakan KPU terkadang terlalu rumit dan formal, sehingga tidak mudah dipahami oleh pemilih pemula. Ketiga, di beberapa daerah pelosok, distribusi informasi masih kurang optimal karena keterbatasan akses teknologi. Meski demikian, sebagian besar responden mengakui bahwa informasi Pemilu secara umum cukup mudah diperoleh baik melalui media daring maupun luring.

Sosialisasi Pemilu terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik berperan penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap politik warga negara. Hasil penelitian serupa oleh Fitriani (2021) juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU melalui sekolah dan media digital mampu meningkatkan pengetahuan dan minat politik di kalangan pemilih muda. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, banyak pemilih muda menyadari bahwa menggunakan hak pilih bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai warga negara. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan pemahaman bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional maupun kebijakan publik yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti sosialisasi, masih banyak kalangan muda yang bersikap apatis atau ragu terhadap proses pemilu. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari KPU, sikap tersebut perlahan berubah menjadi kepedulian. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berperan sebagai instrumen pendidikan politik, yang mampu menekan angka golput dengan cara memberikan keyakinan bahwa partisipasi individu dapat membawa dampak nyata. Dengan kata lain, sosialisasi berhasil menggeser persepsi sebagian pemilih yang sebelumnya merasa suaranya tidak berpengaruh, menjadi lebih optimis bahwa keterlibatan mereka penting dalam sistem demokrasi.

Selain faktor kesadaran diri sebagai warga negara, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Ajakan dari tokoh masyarakat terbukti efektif dalam

mendorong partisipasi, terutama di kalangan masyarakat yang masih menjadikan figur publik atau pemuka agama sebagai rujukan utama dalam mengambil keputusan politik. Kejelasan informasi juga menjadi faktor kunci; pemilih yang memperoleh penjelasan detail mengenai mekanisme pemilu, tata cara pencoblosan, maupun manfaat keterlibatan mereka, cenderung lebih mantap untuk hadir di TPS.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau program pendidikan, mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi karena merasa suara mereka berhubungan langsung dengan kualitas kepemimpinan yang dipilih. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan teknis mengenai prosedur pemilu, tetapi juga berfungsi untuk membangun kesadaran kritis dan motivasi kolektif agar masyarakat melihat pemilu sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Batam telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Program *Goes to School* dan *Goes to Campus*, disertai pemanfaatan media sosial, terbukti mendapat respons positif dari generasi muda. Kegiatan kreatif seperti lomba video, pantun, dan nonton bareng juga berhasil menarik minat, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek keberlanjutan dan inovasi. Namun, terdapat tantangan signifikan berupa penurunan partisipasi dari Pemilu (76,48%) ke Pilkada (48,53%). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antusiasme antara pemilu tingkat nasional dan lokal, sehingga strategi yang lebih intensif dan konsisten dibutuhkan untuk menjaga stabilitas partisipasi di semua level pemilu. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan partisipasi dari Pemilu ke Pilkada yang menandakan perbedaan antusiasme antara pemilu nasional dan lokal (Putri, 2019).

Sosialisasi dinilai efektif dalam meningkatkan literasi politik prosedural, pemahaman tahapan pemilu, serta kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemilih pemula merasa lebih siap berpartisipasi setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun, efektivitas jangka panjang tetap dipengaruhi oleh kualitas konten, keberlanjutan program, serta dukungan ekosistem demokrasi yang kondusif. Oleh karena itu, optimalisasi peran KPU tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor seperti sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan media massa sangat diperlukan. Langkah strategis yang harus diperkuat mencakup inovasi konten digital, penggunaan bahasa komunikasi yang sederhana dan relevan dengan gaya anak muda, serta perluasan jangkauan sosialisasi ke wilayah *hinterland*. (Fitriani, 2021; Rahayu, 2021). Dengan pendekatan terpadu ini, partisipasi pemilih pemula diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Batam telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan. Program seperti KPU *Goes to School*, KPU *Goes to Campus*, simulasi pemungutan suara, serta pelatihan relawan demokrasi terbukti efektif dalam menumbuhkan minat dan partisipasi politik generasi muda. Keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah-langkah inovatif KPU yang memanfaatkan berbagai media komunikasi, terutama media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, sebagai sarana edukasi politik yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik pemilih muda. Penggunaan konten kreatif berupa video pendek, infografis, dan kuis digital juga membantu memperluas

jangkauan informasi serta menarik perhatian audiens dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Meskipun demikian, KPU masih menghadapi sejumlah tantangan eksternal seperti kejenuhan terhadap kegiatan pemilu, keterbatasan waktu sosialisasi, serta rendahnya minat sebagian pemilih muda terhadap isu politik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas kreatif agar kegiatan sosialisasi menjadi lebih variatif, partisipatif, dan relevan dengan dunia anak muda. Selain itu, partisipasi pemilih pemula juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, pemberitaan media massa, serta persepsi terhadap kinerja pemerintah, sehingga strategi sosialisasi perlu mempertimbangkan konteks sosial masyarakat secara lebih luas dan berorientasi pada pendekatan dialogis.

Sebagai rekomendasi, KPU Kota Batam disarankan untuk terus mengembangkan inovasi berbasis digital, memperkuat kemitraan lintas sektor, serta melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program sosialisasi. Riset lanjutan juga diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang dari strategi sosialisasi yang diterapkan terhadap perilaku memilih generasi muda pada pemilu mendatang, sehingga peningkatan partisipasi politik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bermakna.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2013). Partisipasi politik dalam sistem demokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 33–41.
- Anggara, S. (2016). *Teori dan praktik partisipasi politik*. Alfabeta.
- Biroroh, R., & Muwahid, S. (2021). Fungsi pemilu dalam pendidikan politik masyarakat. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 6(2), 112–124.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, N. (2021). Inovasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 12(2), 75–90.
- Halilah. (2022). Pemilu sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 145–158.
- Hamzah, F. (2017). Konflik elit politik dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 43–57.
- Hidayat, M. (2020). Kesenjangan sosial-ekonomi dalam partisipasi politik. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 22–37.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat*.

- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (2011). Partisipasi politik di era modernisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 77–92.
- Megawati, A., & Padang, R. (2020). Fenomena golput dan rendahnya partisipasi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 201–214.
- Nugroho, A., & Sukmariningsih, W. (2020). Profesionalisme KPU dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 67–81.
- Pratama, Y. (2022). Literasi digital dan partisipasi politik generasi Z. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 11(3), 210–223.
- Putri, D. A. (2019). Pemilih pemula dan tantangan literasi politik. *Jurnal Civic Education*, 4(2), 98–110.
- Rahayu, L. (2021). Efektivitas sosialisasi pemilu oleh KPU. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 134–148.
- Siregar, M. (2018). Peran tokoh agama dalam peningkatan partisipasi pemilih. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 89–101.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Surbakti, R. (2014). Kesadaran politik dan partisipasi warga. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 1–15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Wulandari, I. (2020). Media sosial sebagai sarana sosialisasi politik. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(1), 55–70.